



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS
(LKjIP)
KECAMATAN JATILAWANG
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KECAMATAN JATILAWANG
KABUPATEN BANYUMAS**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jatilawang, Januari 2021

CAMAT JATILAWANG,

OKA YUDHISTIRA P., S.STP., M.Si.
Pembina
NIP 19811212 200012 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Jatilawang Tahun 2020 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Jatilawang tahun 2018-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Jatilawang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 839.424.500 dengan realisasi sebesar Rp. 770.450.353 atau mencapai 95,98 %. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari Kecamatan Jatilawang indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2020 adalah sangat berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatilawang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksklusif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis.....	8
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	10
D. Rencana Anggaran Tahun 2020	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Indikator Kerja Utama.....	13
B. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	18
C. Akuntabilitas Keuangan	24
BAB IV PENUTUP	28
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatilawang Tahun 2020	9
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatilawang Tahun 2020	10
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2020	11
Tabel 2.4 : Rencana Anggaran Per Sasaran Strategi Tahun 2020	12
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja	13
Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	14
Tabel 3.3 : Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	16
Tabel 3.4 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020	16
Tabel 3.5 : Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2020	18
Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020	19
Tabel 3.7 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	20
Tabel 3.8 : Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	21
Tabel 3.9 : Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	23
Tabel 3.10 : Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Jatilawang Tahun 2020	24
Tabel 3.11 : Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per Sasaran Program Tahun 2020	25
Tabel 3.12 : Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020	26
Tabel 3.13 : Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Jatilawang Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Jatilawang Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2020. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Jatilawang

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas seluas 4.815,92 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.643 ha atau sekitar 34 % dari wilayah Kecamatan Jatilawang sedangkan sisanya sebesar 3.172 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 1.642 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Jatilawang terdapat 11 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Jatilawang dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 23.630 jiwa, dengan penduduk sebesar 74.453 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 40.373 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 34.080 jiwa.

c. Pegawai Pada Kecamatan Jatilawang

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Jatilawang pada tahun 2020 adalah sebanyak 24 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 15 Orang
- Tenaga kontrak : 9 Orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

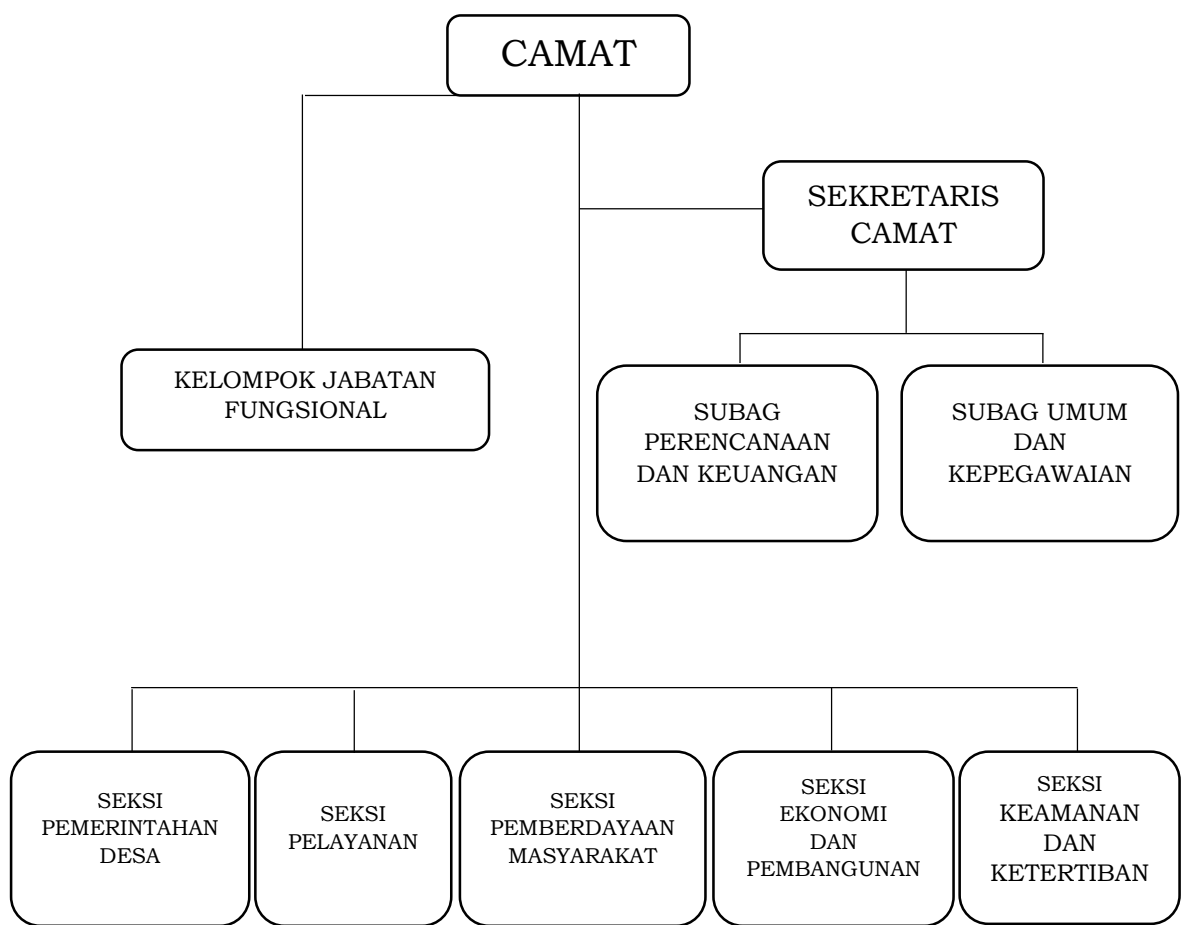
- a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;

- g. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- h. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya tidak terdapat Kelurahan terdiri dari :

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN JATILAWANG



Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan,

fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.
 4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan,

sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.

5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.
6. Seksi Pelayanan dan Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Perijinan, penanaman modal, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang Seksi Pelayanan dan Perijinan.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, persampahan dan kebersihan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan, kearsipan dan perpustakaan, ketransmigrasian dan bidang agama, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Jatilawang tahun 2020 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

2. Kondisi Umum

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

D. Rencana Anggaran Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis

C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2020 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Jatilawang sesuai dengan Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023 adalah ” **MEWUJUDKAN BANYUMAS SEBAGAI BAROMETER PELAYANAN PUBLIK DENGAN MEMBANGUN SISTEM INTEGRITAS BIROKRASI YANG PROFESIONAL, BERSIH PARTISIPATIF, INOVASI DAN BERMARTABAT** ”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik,
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan,
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan,
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatifitas berbasis sumber daya local,
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan,
6. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan,
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktuktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan,
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

Visi dan misi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas 2018-2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Jatilawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatilawang
Tahun 2020

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Peningkatan peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1 Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif
				2 Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatilawang
Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang
Tahun 2020

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		84%
2.	Peningkatan Peran kecamatan dalam Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1.	Presentase Kelompok masyarakat di Kecamatan yang Aktif	100%
		2.	Presentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	100%
3.	Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	1.	Presentase Linmas terbina	100%
		2.	Presentase Pembayaran PBB di Kecamatan	95%
		3.	Presentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	100%
		4.	Presentase pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100%
		5.	Presentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100%
		6.	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	100%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jatilawang pada tahun 2020 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Jatilawang setelah perubahan sebesar Rp. 839.424.500 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 641.274.500 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 198.150.000 Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020

SASARAN PROGRAM		RENCANA ANGGARAN (Rp)
1.	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	549.874.500
2.	Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	72.500.000
3.	Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	189.250.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Jatilawang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2020.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

Realisasi kinerja

% Capaian kinerja = $\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$

Target kinerja

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Jatilawang Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
							%
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		%	83	83	100
2	Peningkatan Peran kecamatan dalam Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	Persentase Kelompok masyarakat di Kecamatan yang Aktif	%	100	100	100
		2	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
3	Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	1	Persentase Linmas terbina	%	80	80	100
		2	Persentase Pembayaran PBB di Kecamatan	%	90	87	96,67

		3	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	95	95	100
		4	Persentase pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik	%	100	100	100
		5	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	100	100	100
		6	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100

Dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Jatilawang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	3	9
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.4
 Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91% ≤ 100%
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
2	Peningkatan Peran kecamatan dalam Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1 Persentase Kelompok masyarakat di Kecamatan yang Aktif	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		2 Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi

3	Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	1	Persentase Linmas terbina	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		2	Persentase Pembayaran PBB di Kecamatan	96,67	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		3	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		4	Persentase pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		5	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		6	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Jatilawang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2020 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1 Indikator
2.	Peningkatan Peran kecamatan dalam Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	2 Indikator
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	6 Indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	%	90	82,03	91	83	83	100
2.	Persentase Kelompok masyarakat di Kecamatan yang Aktif	%	95	75	78	100	100	100
3.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	95	75	78	83	100	100
4.	Persentase Linmas terbina	%	70	65	92	80	80	100
5.	Persentase Pembayaran PBB di Kecamatan	%	95	85	89	90	87	96,67
6.	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	95	80	88	95	95	100
7.	Persentase pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik	%	100	80	80	100	100	100

8.	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	100	84	84	100	100	100
9.	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	-	-	-	100	100	100

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi. Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.7
 Capaian Kinerja
 Sasaran Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	%	90	82,03	91	83	83	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya manusia yang sangat meningkat terutama dalam hal penguasaan Teknologi informatika,
2. Sarana prasarana yang meningkat

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga kerja PNS untuk membantu tugas pelayanan
2. Kurangnya Bintel dan Kursus tentang tugas-tugas yang mendukung pelayanan

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk membantu pelayanan
2. Memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang ada untuk mendukung tugas pelayanan

2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah ” dengan 2 indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian Kinerja

Sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	95	75	78	100	100	100
2	Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	95	75	78	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya lembaga-Lembaga masyarakat yang aktif dalam mengikuti kegiatan Pemerintahan , Pembangunan dan kemasyarakatan,
2. Terjalin Kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dan Desa dalam mengembangkan lembaga Kemasyarakatan Desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran Dana yang mendukung untuk berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan sehingga untuk kegiatan terbentur dengan anggaran,
2. Kurangnya pelatihan-pelatihan kepada lembaga masyarakat dalam berorganisasi sehingga walaupun berjalan tapi kurang berkembang dengan baik.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengusulkan anggaran Lembaga masyarakat sehingga akan meningkatkan perkembangan dalam keikutsertakan dalam pembangunan masyarakat
2. Mengusulkan agar lembaga kemasyarakatan untuk lebih diperbanyak dalam pelatihan-pelatihan yang ada untuk meningkatkan peran serta lembaga Kemasyarakatan.

3. Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan” dengan 6 indikator kinerja adalah sebesar 99,65 % dengan predikat Sangat Tinggi

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9
 Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	80	80	80	100	100
2.	Persentase Linmas terbina	%	70	65	92	90	80	100
3.	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	85	85	95	100	100
4.	Persentase Pembayaran PBB di Kecamatan	%	95	85	89	100	87	96,67
5.	Persentase pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	95	80	88	100	100	100
6.	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	100	84	84	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1. Sering diadakan pembinaan-pembinaan ke desa-desa tentang administrasi Pemerintahan Desa
- 2. Kerjasama antar Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam peningkatan tertib administrasi Desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1. Sumber daya manusia yang ada di desa masih ada yang tidak menguasai teknologi Informatika sehingga menghambat dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa.
- 2. Anggaran yang ada dikecamatan masih kurang dalam hal pelaksanaan monitoring dan Evaluasi ke desa-desa dan tenaga yang masih kurang, dikarenakan hanya dilaksanakan oleh 1 orang PNS.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- 1. Diharap kepada Kepala Desa agar meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya Perangkat Desa dalam bidang TIK.
- 2. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk melaksanakan monev administrasi Pemerintahan yang ada dengan di bantu kasi-kasi yang lain.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Jatilawang yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Jatilawang.
Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.062.646.121	1.828.394.237	88,64
2.	Belanja Langsung	839.424.500	770.450.353	91,78

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jatilawang
Per Sasaran Program Tahun 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Mewujudakan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	549.874.500	515.734.595	93,79
2.	Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	72.500.000	66.134.000	91,22
3.	Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	189.250.000	188.581.758	99,65

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Jatilawang tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	100	515.734.595	93,79
2.	Peningkatan peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan	2	100	66.134.000	91,22
3.	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	6	99,65	188.581.758	99,65

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Jatilawang.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 99%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	100	93,79	-
2.	Peningkatan peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan	2	100	91,22	-
3.	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	6	99	99,65	-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatilawang Tahun 2020 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatilawang Tahun 2020 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

CAPAIAN KINERJA IKU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KECAMATAN JATILAWANG

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			PROGRAM YANG Mendukung IKU			HAMBATAN MASALAH DALAM MENCAPAI TARGET	UPAYA Pencegahan Hambatan/Masalah
				Target	Realisasi	Capaian %	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI		
1.	Mewujudkan kineja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	%	83	83	100	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp 261.750.000	Rp 226.984.258	Dikarenakan situasi dalam keadaan pandemi Covid-19, sehingga seluruh aktifitas pekerjaan menjadi terkendala	Dalam pemasangan Target jangan terlalu besar/tinggi pada masa pandemi seperti saat ini
	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Kelompok masyarakat di Kecamatan yang Aktif	%	100	100	100					
		Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100					

Mengetahui,

CAMAT JATILAWANG





KECAMATAN
JATILAWANG
BANYUWANG

NIP. 19811212 200012 1 003

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS****PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA****KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA
Jabatan : CAMAT KECAMATAN JATILAWANG

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN
Jabatan : BUPATI BANYUMAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 02 Januari 2020

PIHAK KEDUA

Ir. ACHMAD HUSEIN
BUPATI BANYUMAS



PIHAK PERTAMA

OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA
NIP. 198112122000121003

PERJANJIAN KINERJA

SKPD
TAHUN ANGGARAN

: KECAMATAN JATILAWANG
: 2020

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indek Kepuasan Masyarakat Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat		83
Meningkatnya Peran kecamatan dalam Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat				
	Prosentase Kelompok masyarakat di Kecamatan yang Aktif	Formulasi : Jumlah Kelompok masyarakat di Kecamatan yang Aktif di bagi jumlah kelompok masyarakat yang ada kali 100% Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Laporan jumlah kelompok yang aktif	%	100
	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	Formulasi : Jumlah Layanan Kecamatan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah layanan yang ada kali 100% Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : laporan jumlah layanan di Kecamatan	%	100
Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	Persentase Linmas terbina	Formulasi : Jumlah Linmas yang terbina dibagi jumlah Linmas yang ada dikali 100% Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data Linmas dan laporan pembinaan Linmas	%	74
	Persentase Pembayaran PBB di Kecamatan	Formulasi : Realisasi pembayaran PBB dibagi pagu dikali 100% Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data pembayaran PBB dari desa- desa yang direkap di kecamatan	%	92
	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	Formulasi : Jumlah kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif dibagi jumlah kelompok swadaya masyarakat dikali 100% Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data jumlah kelompok swadaya	%	90

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
	Persentase pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik	Formulasi : Jumlah pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik dikali 100% Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data jumlah pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik	%	100
	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	Formulasi : Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes dibagi jumlah desa dikali 100% Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data desa yang telah dibina	%	100
	Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	Formulasi : Jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan dibagi jumlah desa yang ada dikali 100% Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data desa yang tertib administrasi pemerintahan meliputi : Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan Permendagri 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa	%	100

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan	314.150.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	518.400.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	30.300.000,00	APBD
TOTAL		862.850.000,00	

Purwokerto, 02 Januari 2020

PIHAK KEDUA

Ir. ACHMAD HUSEIN
BUPATI BANYUMAS



PIHAK PERTAMA

OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA
NIP. 198112122000121003



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG

Jalan Raya Jatilawang Nomor 1 Jatilawang L 53174
L (0281) 6848539 Faksimile 684853

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA, S.STP., M.Si.

Jabatan : CAMAT JATILAWANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN

Jabatan : BUPATI BANYUMAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, Januari 2021

Pihak Kedua
BUPATI BANYUMAS,

Ir. ACHMAD HUSEIN

Pihak Pertama
CAMAT JATILAWANG



OKA YUDHISTIRA P., S.STP., M.Si.
Pembina
NIP 19811212 200012 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG**

Jalan Raya Jatilawang Nomor 1 Telepon (0281)6848539
JATILAWANG Kode Pos 53174

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
CAMAT KECAMATAN JATILAWANG**

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulir : Indek Kepuasan Masyarakat Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat	Indeks	84
Meningkatnya Peran kecamatan dalam Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat			%	100
	Presentase Kelompok masyarakat di Kecamatan yang Aktif	Formulasi: Jumlah Kelompok masyarakat di Kecamatan yang Aktif di bagi jumlah kelompok masyarakat yang ada kali 100% Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Laporan jumlah kelompok yang aktif	%	100
	Presentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	Formulasi : Jumlah Layanan Kecamatan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah layanan yang ada kali 100% Perhitungan : non kumulatif Sumberdana : laporan jumlah layanan di Kecamatan	%	90
Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	Presentase Linmas terbina	Formulasi : Jumlah Linmas yang terbina dibagi jumlah Linmas yang ada dikali 100 % Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Data Linmas dan laporan pembinaan Linmas	%	100

	Presentase Pembayaran PBB di Kecamatan	Formulasi : Realisasi pembayaran dibagi pagu kali 100 % Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Data pembayaran PBB dari desa-desa yang direkap di kecamatan	%	95
	Presentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	Formulasi : Jumlah kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif dibagi jumlah kelompok swadaya masyarakat dikali 100 % Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Data jumlah kelompok swadaya masyarakat	%	100
	Presentase pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik	Formulasi : Jumlah pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik dikali 100 % Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Data jumlah pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik	%	100
	Presentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	Formulasi : Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes dibagi jumlah desa dikali 100% Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Data desa yang telah dibina	%	100
	Presentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	Formulasi : Jumlah desa yang tertib administrasi pemerintah dibagi jumlah desa yang ada kali 100 % Perhitungan: non kumulatif Sumberdata : Data desa yang tertib adminitrasi pemerintah meliputi : Administrasi umum, Adminitrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan Pemendagri 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa	%	100

No	Program	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 2.750.989.210
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp 17.500.000
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp 46.135.740
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp 7.000.000
5	Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Rp 33.500.000
Jumlah Anggaran		Rp 2.855.124.950

JATILAWANG, Januari 2021

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN


 KAMAT JATILAWANG
 OKA YUDHISTIRA P., S.STP., M.Si.
 NIP. 19811212 200012 1 003